

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA TERHADAP TIONGKOK
TERKAIT SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN PADA MASA PRESIDEN
RODRIGO DUTERTE**

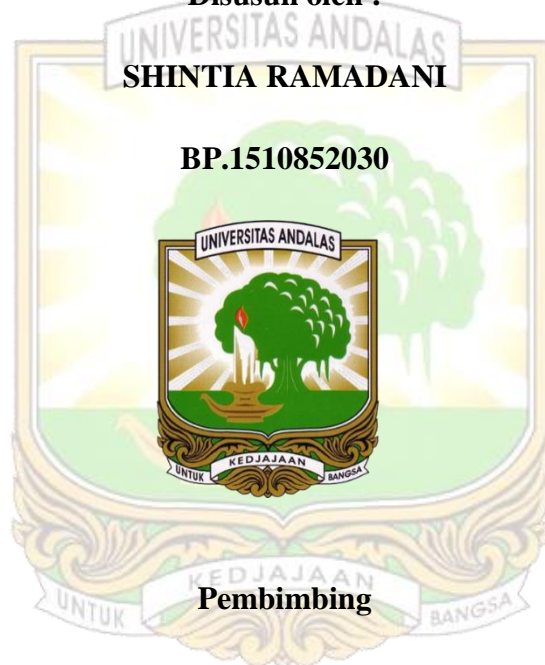
SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Disusun oleh :

SHINTIA RAMADANI

BP.1510852030



Sofia Trisni S.IP, MA,(IntRel)

NIP. 198210182015042002

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

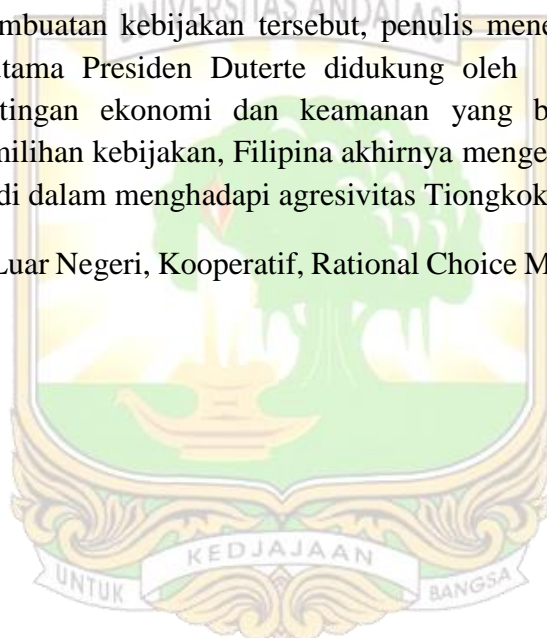
PADANG

2019

ABSTRAK

Filipina dan Tiongkok merupakan dua negara yang ikut serta di dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sengketa antara kedua negara yang berlangsung dari tahun 1947 hingga era kontemporer mengalami peningkatan intensitas ketegangan disebabkan dengan meningkatnya agresivitas Tiongkok terhadap Filipina. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina di zaman sebelum Duterte cenderung konfrontatif di dalam menanggapi agresivitas Tiongkok. Sementara itu di zaman pemerintahan Duterte terjadi perubahan kebijakan Filipina menjadi lebih kooperatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan proses pengambilan kebijakan luar negeri Filipina terhadap agresivitas Tiongkok terkait sengketa kedua negara di Laut Tiongkok Selatan. Kerangka konseptual yang digunakan adalah teori pembuatan kebijakan *rational choice model* dari Charles Kegley dan Shanon Blanton. Berdasarkan tahapan pembuatan kebijakan tersebut, penulis menemukan bahwa para aktor pembuat kebijakan terutama Presiden Duterte didukung oleh Senat memiliki motivasi mempertahankan kepentingan ekonomi dan keamanan yang besar terhadap Tiongkok. Sehingga pada tahap pemilihan kebijakan, Filipina akhirnya mengeluarkan kebijakan rasional yang bersifat kooperatif di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok.

Key Words : Kebijakan Luar Negeri, Kooperatif, Rational Choice Model, Filipina, Duterte dan Laut Tiongkok Selatan



ABSTRACT

Philippines and China are the two countries participating in the South China Sea dispute. The dispute between the two countries that lasted from 1947 to the contemporary era increased the intensity of tension caused by the increasing aggressiveness of China towards the Philippines. Policies issued by the Philippine government in the days before Duterte tended to be confrontational in response to China's aggressiveness. Meanwhile in the era of Duterte administration, changes in Philippine policy became more cooperative. This study aims to identify and describe the process of Philippine foreign policy making process towards China related to the dispute between the two countries in the South China Sea. The conceptual framework used is the theory of rational choice models from Charles Kegley and Shanon Blanton. Based on the theory, the author found that the actors of policy makers, especially President Duterte, supported by the Senate, had the motivation to maintain a large of economic and security interest in China. So that at the policy selection stage, the Philippines finally issued a rational, cooperative policy in the face of China's aggressiveness.

Key Words : *Foreign Policy, Cooperative, Rational Chioice Model, Philippines, Duterte and South China Sea*

